

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang masalah**

Fenomena perubahan jaman atas negeri ini yang ditandai dengan gejala dekadensi moral atau karakter bangsa di kalangan kaum muda juga sebagian pemimpin kita. Dekadensi atau penurunan nilai-nilai moralitas atau karakter bangsa telah membawa bermacam-macam musibah atau bencana nasional negeri ini. Yang meluas di berbagai ranah kehidupan politik, hukum, sosial budaya bahkan keagamaan. Menurut Suyadi (2013: 1) berbagai musibah negeri yang diakibatkan runtuhnya moralitas atau karakter bangsa diantaranya musibah sosial keagamaan berupa hilangnya etika kemanusiaan, dimana penghormatan terhadap jabatan lebih penting daripada penghormatan terhadap pribadi sebagai manusia goncangan di ranah hukum dan politik berupa kasus korupsi hampir di semua meja instansi, money politic, skandal Century, SDA (Sumber Daya Alam) yang luar biasa namun realitas mayoritas masyarakat masih miskin, di ranah keagamaan ditandai dengan maraknya bom bunuh diri, pembakaran tempat ibadah, isu radikalisme, terorisme maupun fundamentalisme. Sementara di ranah hukum dan peradilan terlihat dalam kasus Gayus Tambunan, Cicak versus Buaya, di ranah pendidikan ditandai dengan maraknya tawuran antar pelajar, sek bebas (*free sex*) antar pelajar, kecurangan dalam pelaksanaan Ujian Nasional, dan lain-lain.

Menurut Suyadi (2013: 2) lengkap sudah bencana di negeri ini, semua datang silih berganti mendera bangsa ini bertubi-tubi dan cenderung semakin menjadi-jadi.

Sementara dampak globalisasi yang terjadi saat ini telah menambah semakin jauhnya masyarakat Indonesia dari nilai-nilai karakter bangsa. Runtuhnya karakter bangsa saat ini oleh Kementerian Pendidikan Nasional disinyalir karena terabaikannya pendidikan karakter. Menurut argumen Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) bahwa sejarah bangsa-bangsa yang selalu mengedepankan karakter sebagai solusi berbagai persoalan yang dihadapi. Contohnya revitalisasi bangsa Jerman dilakukan dengan pendidikan karakter dan spiritual. Sedangkan Jepang menata ulang negerinya dengan pendidikan moral dan Amerika Serikat menghadapi krisis global dengan mengintroduksikan kembali pendidikan karakter (Amin Abdullah dalam Suyadi, 2013: 2).

Menurut Darmiyati Zuchdi dalam Suyadi (2013: 2) merujuk pada fakta sejarah bangsa-bangsa lain tersebut Kemendiknas mencanangkan gerakan nasional berupa pendidikan karakter (2010-2025) melalui Keputusan Pemerintah RI oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 11 Mei tahun 2010 dicanangkan gerakan nasional pendidikan karakter. Gerakan ini diharapkan mampu menjadi solusi terhadap rapuhnya karakter bangsa Indonesia, yang menurut Darmiyati Zuchdi hal ini sebagai sarana mewujudkan cita-cita bangsa yang berlandaskan empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara

Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Menurut Suyadi (2013; 2) pendidikan karakter melalui jalur pendidikan diimplementasikan melalui restrukturisasi pendidikan moral mulai dari pendidikan dasar (SD/MI hingga SMA/SMK) dengan nomenklatur baru yakni pendidikan karakter, yang memiliki tujuan mencapai nilai-nilai luhur yang terdapat dalam Pancasila, yang meliputi pemikiran, perasaan serta perilaku luhur dalam kehidupan sehari-hari. Saat itulah dunia pendidikan kita mulai berbenah. Pendidikan yang hanya mengutamakan atau menekankan pada aspek pengetahuan ( *knowledge* ) dan ketrampilan ( *skill* ) tidak cukup efektif mengantarkan bangsa ini ke tujuan nasional, sehingga penataan aspek kepribadian ( *character* ) dan budaya bangsa menjadi sebuah keniscayaan.

Penanaman nilai-nilai karakter melalui jalur atau aspek pendidikan di sekolah/madrasah merupakan salah satu cara atau jalan yang dianggap paling efektif dalam mencari solusi atas permasalahan penurunan nilai-nilai akhlak/moral (*dekadensi moral*) manusia. Hal ini disebabkan pendidikan karakter (*character building*) mendidik seseorang memiliki budaya berpikir dan berperilaku yang baik serta bekerjasama sebagai anggota keluarga, anggota masyarakat, dan warga negara. Senada dengan itu pendidikan karakter mendidik siswa berpikir cerdas, mengaktifasi otak tengah secara alami (Yahya Khan,2010: 1-2).

Menurut Bambang Sumardjoko (2015: 1) pengembangan kompetensi dan pembentukan watak, karakter, serta peradaban bangsa

dilakukan melalui pendidikan yang terencana dan sistematis. Setiap anak bangsa diharapkan dengan proses pendidikan mampu menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, dan emosional. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No.20 Tahun 2003 pasal 3.

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yakni UURI No.20 Tahun 2003 pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa “Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945. Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan, membentuk watak, dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, memiliki tujuan mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Secara umum tujuan pendidikan di Indonesia menjadikan “manusia yang sempurna atau utuh” yang memberikan manfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negaranya. Demikian ini relevan dengan tujuan pendidikan di Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yakni UU RI Nomor 20 Tahun 2003 sebagai berikut.

Pendidikan ialah usaha sadar juga terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran supaya siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk mempunyai kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Dari isi di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan di Indonesia tidak hanya berdimensi pengetahuan namun juga karakter atau kepribadian. Menurut Agustinus Hermino (2014) dalam bukunya “Managemen Kurikulum Berbasis Karakter” dinyatakan bahwa kualitas proses pendidikan dapat dilihat dalam dua aspek, yakni kualitas atau mutu komponen dan kualitas atau mutu pengelolaannya yang saling bergantung. Tercukupinya sarana prasarana pendidikan serta biaya yang memadai namun tidak disertai dengan pengelolaan yang baik maka tujuan tidak tercapai secara maksimal. Menurut beliau unsur-unsur pendidikan yang harus diperhatikan agar tujuan pendidikan tercapai secara optimal baik aspek pengetahuan (kognitif) maupun sikap kepribadian (afektif) meliputi :

1. Peserta didik, yakni subyek yang dibimbing.
2. Pendidik, yakni orang yang membimbing
3. Interaksi edukatif, yakni interaksi antara peserta didik dengan pendidik
4. Tujuan pendidikan, yakni ke arah mana bimbingan ditujukan
5. Materi pendidikan, yakni pengaruh yang diberikan dalam bimbingan
6. Metode dan teknik, yakni cara yang digunakan dalam bimbingan
7. Lingkungan pendidikan, yakni tempat di mana bimbingan berlangsung.

Menurut uraian di atas maka unsur strategis yang tidak bisa diabaikan perannya adalah unsur guru sebagai “*ujung tombak*” pendidikan karena “*guru sebagai pilar utama dalam melahirkan generasi yang berkualitas*”. Tinggi rendahnya mutu generasi yang akan datang sangat ditentukan oleh peranan dan kompetensi guru selaku pendidik.

Guru sebagai tenaga profesional harus betul-betul memiliki kemampuan di bidangnya. Sebagai tenaga profesional guru memiliki tugas membuat perencanaan program, melaksanakan program pembelajaran, dan mengevaluasi hasil pembelajaran (Winarno, 2014: 42). Seorang guru harus membuat program perencanaan kegiatan pembelajaran yang bermutu dan mampu merealisasikan dalam kegiatan belajar mengajar secara konsisten, dengan sistem belajar aktif (*active learning*) dan berpusat pada siswa (*student centered*).

Pembentukan karakter atau kepribadian peserta didik merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua/masyarakat, guru, dan pemerintah. Yang dimaksud guru di sini adalah semua guru tanpa kecuali. Hal itu bisa dilihat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL), yang menyebutkan bahwa SKL bagi lulusan SMA/MA/SMALB/Paket C bagi semua mata pelajaran meliputi 3 (tiga) aspek sekaligus, yakni aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang merupakan bagian tak terpisahkan.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ( PPKn ) merupakan mata pelajaran yang mempunyai misi sebagai pendidikan nilai dan moral Pancasila, kesadaran akan norma dan konstitusi UUD Negara Republik IndonesiaI Tahun 1945, pengembangan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan penghayatan terhadap filosofi Bhinneka Tunggal Ika (Depdikbud, 2014: 2)

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berhubungan erat dengan pendidikan karakter yang merupakan *the deliberate us of all dimensions of school life to fosfer optimal character development* (usaha secara sengaja dari keseluruhan aspek kehidupan sekolah/madrasah untuk menunjang terbentuknya watak atau karakter secara maksimal). Pendidikan karakter atau kepribadian di sekolah/madrasah memiliki tujuan sebagai berikut : 1) memperkuat dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap perlu sehingga menjadi kepribadian/karakter yang dimiliki peserta didik yang khas sebagaimana nilai-nilai karakter yang dikembangkan; 2) mengoreksi dan mengevaluasi perilaku peserta didik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai karakter yang dikembangkan oleh sekolah/madrasah; 3) membangun koneksi yang harmoni antara keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam memerankan tanggung jawab pendidikan karakter/kepribadian bersama.

Menurut Pusat Kurikulum Balai Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat 18 butir nilai-nilai karakter/kepribadian yang perlu diimplementasikan oleh bangsa Indonesia yakni; religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, serta tanggung jawab. Untuk efektivitas dalam pencapaian tujuan pendidikan maka pendidikan karakter/kepribadian di sekolah/madrasah memerlukan metode khusus

yang tepat atau akurat. Diantara banyak metode pembelajaran yang paling relevan adalah metode keteladanan, metode pembiasaan dan metode pemberian hadiah (*reward*) dan hukuman (*punishment*).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis sangat tertarik mengadakan pengkajian lebih lanjut tentang Penanaman Nilai-Nilai Karakter dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan melalui penelitian yang berjudul **“Penanaman Nilai-Nilai Karakter dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kelas X di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Klaten”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Fokus dari penelitian ini adalah pada usaha mengkaji Penanaman Nilai-Nilai Karakter dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kelas X di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Klaten, yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hambatan yang dihadapi dan solusi yang bisa dilakukan dalam menyelesaikan hambatan yang dihadapi yang berdampak pada siswa.

Sesuai dengan fokus penelitian di atas, dapat dirumuskan masalah atau pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perencanaan penanaman nilai-nilai karakter dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kelas X di Madrasah Aliyah Muhammadiyah (MAM) Klaten?



2. Bagaimanakah pelaksanaan penanaman nilai-nilai karakter dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kelas X di Madrasah Aliyah Muhammadiyah (MAM) Klaten?
3. Bagaimanakah penilaian (evaluasi) penanaman nilai-nilai karakter dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kelas X di Madrasah Aliyah Muhammadiyah (MAM) Klaten?
4. Bagaimanakah hambatan atau kendala penanaman nilai-nilai karakter dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Madrasah Aliyah Muhammadiyah (MAM) Klaten ?
5. Bagaimanakah solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan atau kendala penanaman nilai-nilai karakter dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Madrasah Aliyah Muhammadiyah (MAM) Klaten?

### **C. Tujuan penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan perencanaan penanaman nilai-nilai karakter dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kelas X di Madrasah Aliyah Muhammadiyah (MAM) Klaten.
2. Mendeskripsikan pelaksanaan penanaman nilai-nilai karakter dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) kelas X di Madrasah Aliyah Muhammadiyah (MAM) Klaten.

3. Mendeskripsikan penilaian (evaluasi) penanaman nilai-nilai karakter dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Klaten.
4. Mendeskripsikan hambatan atau kendala penanaman nilai-nilai karakter dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Madrasah Aliyah Muhammadiyah (MAM) Klaten.
5. Mendeskripsikan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan atau kendala penanaman nilai-nilai karakter dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Klaten.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk pembentukan watak atau karakter siswa lewat pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Madrasah Aliyah Muhammadiyah (MAM) Klaten maupun institusi pendidikan pada umumnya, dan di sisi lain secara teoritis maupun secara praktis juga dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan bahan kajian tentang penanaman nilai-nilai karakter di Madrasah Aliyah sekabupaten Klaten, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, evaluasi/penilaian maupun cara mengatasi hambatan yang muncul dalam penanaman nilai-nilai karakter dalam pembelajaran PPKn.

## 2. Manfaat praktis.

- a. Guru Mapel PPKn : sebagai bahan masukan, pedoman atau acuan dalam proses penanaman nilai-nilai karakter peserta didik, khususnya dalam pemilihan media dan sumber belajar, metode, strategi serta jenis penilaian yang tepat dalam pembelajaran.
- b. Kepala Madrasah : sebagai bahan rujukan dan pertimbangan dalam kerangka pengembangan pendidikan karakter di lingkungan Madrasah Aliyah.
- c. Dinas Pendidikan/Kemenag : sebagai bahan kajian serta informasi dan wawasan dalam penanaman nilai-nilai karakter di lingkungan Pendidikan Menengah Atas/Madrasah Aliyah se-Kabupaten Klaten.